PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

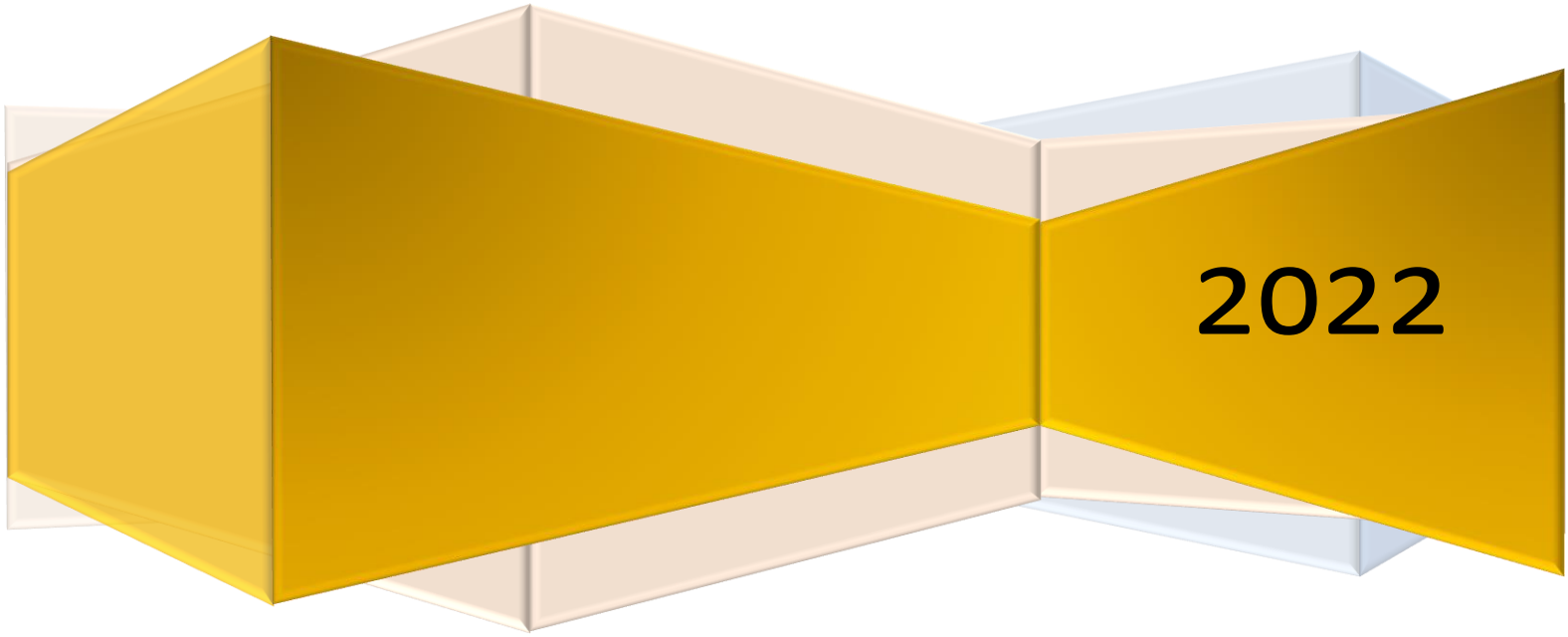

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Tahun 2022 ini. Renja Perubahan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan.

Pembuatan Rencana Kerja Perubahan ini berpedoman atas Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSPP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 serta dokumen perencanaan Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD–P) Tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja perubahan DPMPTSPP Tahun 2022 ini walaupun bentuknya masih jauh dari yang diharapkan, namun demikian Rencana Kerja DPMPTSPP Tahun 2022 ini kiranya dapat menjadi acuan dan pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.

Manggar, 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

Drs. Liatim
NIP 19641224 199203 1 007

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja..... 8

1.4. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSPP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022..... 1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSPP sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSPP 1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 22

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 25

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022..... 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaakat..... 45

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSPP..... 1

BAB IV PENUTUP 1

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur..... 2

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur 23

Tabel 2.3 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2022 DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur..... 29

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur..... 46

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2022 DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur..... 2

Tabel 3.2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur..... 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSPP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dan memenuhi amanat Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Penyusunan perubahan Rencana Kerja DPMPTSPP Tahun 2022 ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSPP Tahun 2022 sampai dengan triwulan II yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi; a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Penyesuaian beberapa target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 sehingga tidak lebih rendah daripada capaian tahun 2021.

2. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.

3. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang belum tertampung dalam Penetapan tahun 2022 antara lain penyesuaian penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur sebagai Instansi Daerah yang menangani Urusan Wajib Penanaman Modal serta urusan pilihan Perdagangan dan Industri, berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) kemudian menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
33. Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

35. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
36. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
37. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender di Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan keduakalinya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
48. Surat Edaran Mendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
49. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
54. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pegarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 17);
56. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);dan
57. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 28).
58. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 55);

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSPP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Perubahan Dokumen Renja DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan

   Dokumen Renja Perubahan DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSPP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSPP sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSPP

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSPP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSPP Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSPP

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Hasil evaluasi Renja ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2022.

Capaian Pelaksanaan Renja DPMPTSPP sampai dengan triwulan II Tahun 2022 seperti yang tergambar pada Tabel 2.1 memperlihatkan capaian rata-rata kinerja fisik sebesar 53,39% dan capaian realisasi keuangan sebesar 27,76% dari keseluruhan pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar urusan penanaman modal dan urusan pilihan perdagangan dan perindustrian yang dijabarkan melalui 14 Program dan 23 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp 16.691.530.593,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan kedua sebesar Rp 4.633.431.400.

Masih rendahnya capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan dikarenakan adanya perubahan pada sebagian besar pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (baik di bidang Penanaman Modal, maupun Bidang Industri Kecil dan Menengah)

Berikut hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur pada masa berjalan tahun 2022 sampai dengan triwulan kedua tahun 2022.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Semua Bidang																			
7.1 PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	82	48.183.399.720		-	70	7.729.516.933		882.031.509		1.534.674.270	88,11	2.416.705.779	125,87 %	31,27%		2.416.705.779		5,02%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	500	95.000.000	0,00	-	100	5.282.350	80	-	80,00	1.422.400	80,00	1.422.400	80,00%	26,93%	80,00	1.422.400	16,00 %	1,50%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	4	95.000.000	0,00	-	4	5.282.350	-	-	2,00	1.422.400	2,00	1.422.400	50,00%	26,93%	2,00	1.422.400	50,00 %	1,50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	500	35.895.200.000	0,00	-	100	5.879.543.000	100	769.653.119	100,00	1.188.346.899	100,00	1.958.000.018	100,00 %	33,30%	100,00	1.958.000.018	20,00 %	5,45%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	46	35.895.200.000	0,00	-	46	5.879.543.000	34	769.653.119	34,00	1.188.346.899	17,00	1.958.000.018	36,96%	33,30%	17,00	1.958.000.018	36,96 %	5,45%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	395	465.500.000	0,00	-	75	32.537.000	-	-	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	133,33 %	6,15%	100,00	2.000.000	25,32 %	0,75%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	10	200.000.000	0,00	-	2	15.119.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	32	265.500.000	0,00	-	5	17.418.000	1	-	1,00	2.000.000	2,00	2.000.000	40,00%	11,48%	2,00	2.000.000	6,25%	0,75%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	425	4.208.550.870	0,00	-	80	607.731.563	-	37.801.068	87,50	122.891.763	87,50	160.692.831	109,38 %	26,44%	87,50	160.692.831	20,59 %	39,45%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	55	134.985.000	0,00	-	11	19.120.000	11	-	11,00	5.005.000	5,50	5.005.000	50,00%	26,18%	5,50	5.005.000	10,00 %	3,71%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	275	501.516.000	0,00	-	55	119.679.173	55	-	55,00	27.231.000	27,50	27.231.000	50,00%	22,75%	27,50	27.231.000	10,00 %	5,43%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	220	225.088.000	0,00	-	44	41.673.820	44	-	44,00	7.299.000	22,00	7.299.000	50,00%	17,51%	22,00	7.299.000	10,00 %	3,24%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	45	173.515.000	0,00	-	9	40.383.000	9	3.774.000	9,00	5.740.000	4,50	9.514.000	50,00%	23,56%	4,50	9.514.000	10,00 %	5,48%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	40	412.338.870	0,00	-	8	72.891.570	8	3.369.250	8,00	2.975.750	4,00	6.345.000	50,00%	8,70%	4,00	6.345.000	10,00 %	1,54%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)	10	37.380.000	0,00	-	2	6.360.000	2	512.000	2,00	938.000	1,00	1.450.000	50,00%	22,80%	1,00	1.450.000	10,00 %	3,88%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kali)	40	23.728.000	0,00	-	8	4.228.000	3	1.477.000	3,00	1.473.000	6,00	2.950.000	75,00%	69,77%	6,00	2.950.000	15,00 %	12,43%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	282	2.700.000.000	0,00	-	42	303.396.000	17	28.668.818	28,00	72.230.013	28,00	100.898.831	66,67%	33,26%	28,00	100.898.831	9,93%	3,74%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	300	987.750.000	0,00	-	50	121.137.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya (Unit)	70	987.750.000	0,00	-	28	121.137.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	442	3.799.401.350	0,00	-	83	727.297.500	-	58.943.522	100,00	168.603.108	100,00	227.546.630	120,48 %	31,29%	100,00	227.546.630	22,62 %	18,18%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	20	1.176.120.000	0,00	-	4	186.040.000	4	12.204.500	4,00	42.568.900	2,00	54.773.400	50,00%	29,44%	2,00	54.773.400	10,00 %	4,66%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi (Jenis)	25	681.883.850	0,000	-	5	182.720.000	5	20.454.022	5,00	28.131.708	2,50	48.585.730	50,00%	26,59%	2,50	48.585.730	10,00 %	7,13%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	145	1.941.397.500	0,000	-	29	358.537.500	12	26.285.000	12,00	97.902.500	12,00	124.187.500	41,38%	34,64%	12,00	124.187.500	8,28%	6,40%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	468	2.731.997.500	0,000	-	90	355.988.500	-	15.633.800	90,22	51.410.100	90,22	67.043.900	100,24 %	18,83%	90,22	67.043.900	19,28 %	6,33%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)	100	1.621.997.500	0,000	-	20	275.388.500	20	13.373.800	20,00	47.330.100	10,00	60.703.900	50,00%	22,04%	10,00	60.703.900	10,00 %	3,74%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)	20	865.000.000	0,000	-	4	47.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	50	245.000.000	0,000	-	10	33.100.000	10	2.260.000	10,00	4.080.000	5,00	6.340.000	50,00%	19,15%	5,00	6.340.000	10,00 %	2,59%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						39,14 %	31,27%				
									Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.1 MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	100	480.000.000		-	66,67	41.892.700		-		-	60,00	-	90,00%	0,00%		-		0,00%
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	12	230.000.000	0,00	-	2	6.799.700	2	-	2,00	-	2,00	-	100,00 %	0,00%	2,00	-	16,67 %	0,00%
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sosialisasi dokumen kebijakan Daerah terkait penanaman modal (Kali)	4	230.000.000	0,00	-	1	6.799.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase informasi investasi	500	250.000.000	0,	-	100	35.093.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		yang tersedia (persen)			00															
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi potensi atau peluang usaha (Dokumen)	5	250.000.000	0,00	-	1	35.093.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3.1 MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Investor baru yang berinvestasi (Investor)	9	3.050.750.000		-	1	241.503.500		41.971.680		51.552.500	17,00	93.524.180	1700,00%	38,73%	0,00	93.524.180		3,07%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan sektor usaha yang di promosikan (sektor)	20	3.050.750.000	0,00	-	4	241.503.500	-	41.971.680	4,00	51.552.500	4,00	93.524.180	100,00%	38,73%	4,00	93.524.180	20,00%	5,04%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Fasilitasi kerjasama strategis antar usaha besar dan UKM (UKM)	9	870.750.000	0,00	-	1	130.187.500	-	2.415.000	-	8.452.500	-	10.867.500	0,00%	8,35%	0,00	10.867.500	0,00%	1,25%
		Laporan monitoring kerjasama penanaman modal (Laporan)	60		0,00		12		3		6,00		6,00		50,00%		6,00		10,00 %	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi peluang penanaman modal/investasi (Kali)	0	2.180.000.000	0,00	-	2	111.316.000	1	39.556.680	-	43.100.000	1,00	82.656.680	50,00%	74,25%	1,00	82.656.680	0,00%	3,79%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			36,52 %	38,73%				
												Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.1 MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	86	1.699.779.800		-	83,5	240.427.300		14.505.000		53.970.500	85,51	68.475.500	102,41 %	28,48%		68.475.500		4,03%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (persen)	50	1.699.779.800	0,00	-	8	240.427.300	-	14.505.000	-	53.970.500	-	68.475.500	0,00%	28,48%	0,00	68.475.500	0,00%	4,28%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan (Laporan)	60	1.599.779.800	0,000	-	12	230.179.500	3	14.505.000	3,00	53.970.500	6,00	68.475.500	50,00%	29,75%	6,00	68.475.500	10,00 %	4,28%
		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan)	10		0,000		2		-		1,00		1,00		50,00%		1,00		10,00 %	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen (Kali)	300	100.000.000	0,00	-	50	10.247.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						47,87 %	28,48%				
									Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.1 MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	22	2.870.155.000		-	18	476.975.500		2.380.000		133.162.806	6,00	135.542.806	33,33%	28,42%		135.542.806		4,72%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (persen)	184	2.870.155.000	0,00	-	7	476.975.500	-	2.380.000	24,05	133.162.806	24,05	135.542.806	343,57 %	28,42%	24,05	135.542.806	13,07 %	13,36%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)	125	688.000.000	0,00	-	25	113.518.000	-	2.380.000	1,00	12.550.000	1,00	14.930.000	4,00%	13,15%	1,00	14.930.000	0,80%	2,17%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Pelaksanaan	20	1.067.155.000	0,	-	4	195.323.000	-	-	2,00	91.432.806	2,00	91.432.806	50,00%	46,81%	2,00	91.432.806	10,00 %	8,57%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penanaman Moda (Kali)			00															
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)	750	1.115.000.000	0,00	-	150	168.134.500	-	-	19,00	29.180.000	19,00	29.180.000	12,67%	17,36%	19,00	29.180.000	2,53%	2,62%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			25,89 %	28,42%				
												Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.5 MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA, KEBIJAKAN INTERNAL DAN LAYANAN SPBE	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	100	300.000.000		-	54,55	40.140.000		2.380.000		8.330.000	71,43	10.710.000	130,94 %	26,68%		10.710.000		3,57%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (persen)	452	300.000.000	0,00	-	89	40.140.000	-	2.380.000	92,86	8.330.000	92,86	10.710.000	104,34 %	26,68%	92,86	10.710.000	20,55 %	3,57%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang telah diolah (Laporan)	60	300.000.000	0,00	-	12	40.140.000	3	2.380.000	3,00	8.330.000	6,00	10.710.000	50,00%	26,68%	6,00	10.710.000	10,00 %	3,57%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			50,00 %	26,68%				
												Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			
1.1 MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Persen)	45	150.000.000		-	26	30.000.000		-		-	-	-	0,00%	0,00%		-		0,00%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki izin (Persen)	350	150.000.000	0,00	-	25	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sosialisasi dan pendampingan perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan (Kali)	5	150.000.000	0,00	-	1	30.000.000	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00 %	0,00%	1,00	-	20,00 %	0,00%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			100,00 %	0,00%				

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
3.1 MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Persen)	100	41.830.000.000		-	100	2.150.495.910		67.638.409		1.379.727.454	-	1.447.365.863	0,00%	67,30%		1.447.365.863		3,46%
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	cakupan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan (persen)	500	41.830.000.000	0,00	-	100	2.150.495.910	-	67.638.409	-	1.379.727.454	-	1.447.365.863	0,00%	67,30%	0,00	1.447.365.863	0,00%	29,07%
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan/ Revitalisasi sarana prasarana perdagangan (Unit)	8	37.000.000.000	0,00	-	3	348.363.450	-	-	1,00	49.600.000	1,00	49.600.000	33,33%	14,24%	1,00	49.600.000	12,50 %	0,13%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Laporan)	60	4.830.000.000	0,00	-	12	1.802.132.460	3	67.638.409	3,00	1.330.127.454	6,00	1.397.765.863	50,00%	77,56%	6,00	1.397.765.863	10,00 %	28,94%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			47,30 %	67,30%				
												Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sedang				
6.1 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Persen)	3	481.000.000		-	3,79	80.000.000		2.380.000		12.535.000	3,37	14.915.000	88,92%	18,64%		14.915.000		3,10%
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kecukupan stok Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting) (Hari)	485	150.000.000	0,00	-	60	30.000.000	-	2.380.000	7,00	8.330.000	7,00	10.710.000	11,67%	35,70%	7,00	10.710.000	1,44%	7,14%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengawasan stok bapokting (barang pokok dan barang penting) yang dilakukan (Kali)	72	150.000.000	0,00	-	12	30.000.000	3	2.380.000	3,00	8.330.000	6,00	10.710.000	50,00%	35,70%	6,00	10.710.000	8,33%	7,14%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap harga rata-rata nasional (persen)	350	200.000.000	0,00	-	50	33.000.000	-	-	-	4.205.000	-	4.205.000	0,00%	12,74%	0,00	4.205.000	0,00%	2,10%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting (Laporan)	60	200.000.000	0,00	-	12	33.000.000	3	-	3,00	4.205.000	6,00	4.205.000	50,00%	12,74%	6,00	4.205.000	10,00 %	2,10%
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio penerima pupuk terhadap RDKK (Persen)	4	131.000.000	0,00	-	7	17.000.000	-	-	18,00	-	18,00	-	257,14 %	0,00%	18,00	-	450,00%	0,00%
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan (Kali)	20	29.000.000	0,00	-	4	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk yang dilakukan (Kali)	10	50.500.000	0,00	-	2	6.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk yang dilakukan (Kali)	60	51.500.000	0,00	-	12	6.000.000	3	-	3,00	-	6,00	-	50,00%	0,00%	6,00	-	10,00 %	0,00%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			43,13 %	18,64%				
												Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.1 MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor (Produk)	2	225.000.000		-	1	20.000.000		-		-	-	-	0,00%	0,00%		-		0,00%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi promosi produk unggulan ekspor (pelaku usaha)	20	225.000.000	0,000	-	2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pembinaan pelaku/calon pelaku usaha ekspor (Kali)	5	225.000.000	0,000	-	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.1 MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (Persen)	74	4.965.000.000		-	72	193.499.680		-		17.187.900	84,40	17.187.900	117,22 %	8,88%		17.187.900		0,35%
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Persen)	78				70						87,50		125,00 %					
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	UTTP bertanda tera sah (UTTP)	4500		0,000		850		618		718,0 0		718,00		84,47%		718,00		15,96 %	
		pelaku usaha yang melakukan pelanggaran metrologi legal (usaha)	21	4.965.000.000	0,000	-	5	193.499.680	-	-	3,00	17.187.900	3,00	17.187.900	60,00%	8,88%	3,00	17.187.900	14,29 %	5,73%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Sidang Tera yang dilaksanakan (Kali)	35	4.870.000.000	0,000	-	7	168.499.730	-	-	-	11.981.900	-	11.981.900	0,00%	7,11%	0,00	11.981.900	0,00%	0,25%
		Pengadaan Peralatan Kemetrologian (Unit)	65		0,000		15		-		15,00		15,00		100,00 %		15,00		23,08 %	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan Metrologi legal yang dilaksanakan (Kali)	35	95.000.000	0,000	-	7	24.999.950	-	-	7,00	5.206.000	7,00	5.206.000	100,00 %	20,82%	7,00	5.206.000	20,00 %	5,48%
															56,46 %	8,88%				
															Rendah	Sangat Rendah				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
4.1 MEMULIHKAN STABILITAS EKONOMI DI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, PARIWISATA, DAN INDUSTRI PENGOLAHAN	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah (Persen)	6	12.718.000.000		-	5,8	5.363.083.270		4.835.000		408.048.872	-	412.883.872	0,00%	7,70%		412.883.872		3,25%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase industri kecil menengah(IKM) yang berkembang/tumbuh setelah mendapat pelatihan/pendampingan (persen)	9645	12.718.000.000	0,00	-	40	5.363.083.270	-	4.835.000	-	408.048.872	-	412.883.872	0,00%	7,70%	0,00	412.883.872	0,00%	20,34%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra IKM yang dibina (Sentra)	25	270.000.000	0,00	-	5	38.100.200	-	2.380.000	3,00	9.715.200	3,00	12.095.200	60,00%	31,75%	3,00	12.095.200	12,00 %	4,48%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang disertifikasi (IKM)	475	3.050.000.000	0,00	-	95	137.437.150	-	-	95,00	45.301.150	95,00	45.301.150	100,00 %	32,96%	95,00	45.301.150	20,00 %	1,49%
		Jumlah SDM IKM yang terlatih (IKM)	200		0,00		40		-		40,00		40,00		100,00 %		40,00		20,00 %	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumah Kelompok IKM yang terfasilitasi sarana prasarana industri (Kelompok)	20	5.562.500.000	0,00	-	4	20.062.750	-	-	1,00	5.286.400	1,00	5.286.400	25,00%	26,35%	1,00	5.286.400	5,00%	0,10%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Kerajinan yang terfasilitasi pembina kerajinan (IKM Kerajinan)	150	3.522.500.000	0,00	-	30	5.124.583.370	-	-	30,00	335.297.282	30,00	335.297.282	100,00 %	6,54%	30,00	335.297.282	20,00 %	9,52%
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan IKM (Laporan)	60	313.000.000	0,00	-	12	42.899.800	3	2.455.000	3,00	12.448.840	6,00	14.903.840	50,00%	34,74%	6,00	14.903.840	10,00 %	4,76%

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						99,04 %	7,70%				
									Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
1.1 MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha (Persen)	35	109.000.000		-	25	10.349.800		-		1.104.000	-	1.104.000	0,00%	10,67%		1.104.000		1,01%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin yang dipantau dan dianalisis terhadap izin yang dikeluarkan (Persen)	100	109.000.000	0,00	-	10	10.349.800	-	-	7,89	1.104.000	7,89	1.104.000	78,90%	10,67%	7,89	1.104.000	7,89%	1,01%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen pelaku usaha industri yang telah berizin usaha (Kali)	20	109.000.000	0,00	-	4	10.349.800	-	-	1,00	1.104.000	1,00	1.104.000	25,00%	10,67%	1,00	1.104.000	5,00%	1,01%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						25,00 %	10,67%				
									Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/6x100%		11 = 5 + 9		12=11/4 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.5 MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA, KEBIJAKAN INTERNAL DAN LAYANAN SPBE	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase data informasi Industri di SIINAS (Persen)	75	512.000.000		-	58,33	73.646.000		2.415.000		12.601.500	-	15.016.500	0,00%	20,39%		15.016.500		2,93%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase industri kecil dan menengah yang menyampaikan data dan informasi secara lengkap (persen)	18473	512.000.000	0,00	-	90	73.646.000	-	2.415.000	-	12.601.500	-	15.016.500	0,00%	20,39%	0,00	15.016.500	0,00%	2,93%
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Laporan informasi data IKM (Laporan)	60	512.000.000	0,00	-	12	73.646.000	3	2.415.000	3,00	12.601.500	6,00	15.016.500	50,00%	20,39%	6,00	15.016.500	10,00%	2,93%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	20,39%				
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
									JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**4.633.431.400**							
							16.691.530.593		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**						**59,39%**	**27,76%**				
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Rendah**	**Sangat Rendah**				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

TIndikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD 2021-2026. Penetapan Indikator ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing pada urusan masing-masing Perangkat Daerah. Akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan setiap tahun merupakan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Srategis Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan terbagi pada urusan Penanaman Modal, urusan Perdagangan dan urusan Perindustrian sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Indikator Renstra 2021-2026										
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik PTSP			53	54	60	67	73,83	Na	74	Realisasi tahun 2022 belum tersedia karena data bersifat tahunan
1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang			65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	74,75 = C	Na	75	
1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah			B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	63,08 = B	71,72 = BB	71,75 = BB	
1.3	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang (79,99)	Na	Tinggi (80)	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,6	2,7	2,8	2,9	2,15	**Na**	2,15	
2.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			63 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	83,33persen	Na	83,33 persen	
3	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN)			359,057 juta rupiah	367382 juta rupiah	378771 juta rupiah	390513 juta rupiah	472,466juta rupiah	**Na**	472,466 juta rupiah	
3.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM			11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	64,84 persen	Na	65 persen	
4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			2,96 persen	3,11 persen	3,25 persen	3,4 persen	-0,49 persen	**Na**	0,5 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
4.1	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan			237921600 persen	242.849.110	254.902.923	267.557.653	236.073.515	Na	240.000.000	
5	Indeks Daya Saing Daerah			1,59	1,61	1,62	1,63	2,665	**Na**	2,665	
5.1	PDRB sector perdagangan (Milyar Rupiah)			530,4 milyar rupiah	548,96 milyar rupiah	559,94 milyar rupiah	571,14 milyar rupiah	565,33** milyar rupiah	Na	566 milyar rupiah	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSPP berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 12 tahun 2022 tentang Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. DPMPTSPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam urusan penanaman modal, urusan perdagangan dan urusan perindustrian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian, serta melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
b. penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
d. penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
e. penyelenggaraan administrasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan; dan
f. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, ditetapkan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi DPMPTSPP terdiri dari :
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat;
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan; dan
      3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal

1. Subkoordinator Promosi dan Kerja Sama Investasi; dan
2. Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi

1. Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan; dan
2. Subkoordinator Dokumentasi, Data dan Informasi.

e. Bidang Pelayanan Perizinan

1. Subkoordinator Pelayanan Pendaftaran;
2. Subkoordinator Perizinan Dasar dan Non Perizinan; dan
3. Subkoordinator Perizinan Usaha.

f. Bidang Perdagangan

1. Subkoordinator Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan;
2. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perdagangan; dan
3. Subkoordinator Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

g. Bidang Perindustrian

1. Subkoordinator Industri Pangan, Sandang dan Aneka;
2. Subkoordinator Industri Kerajinan, Logam dan Kimia; dan
3. Subkoordinator Pengembangan Wilayah Industri.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

i. Unit Pelaksana Teknis

Seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur, memunculkan Isu-isu penting dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi tersebut. Isu-isu tersebut diuraikan sebagai berikut:

Urusan Penanaman Modal

1. Masih Rendahnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Belitung Timur. Faktor penyebab yang terkait dengan isu strategis ini diantaranya:
   a. Kurangnya informasi potensi investasi yang lebih terperinci dan terkini
   b. Masih banyak masyarakat yang belum paham proses perizinan secara online
   c. Belum optimalnya pengembangan Sistem OSS RBA yang digunakan untuk proses perizinan berusaha dan belum terintegrasinya OSS RBA dengan SIMBG, GISTARU, AMDALNET.

d. Rendahnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan nilai real (sebenarnya) realisasi investasi mereka.
e. Data dan informasi perizinan belum terintegrasi seluruhnya

Untuk menjawab faktor penyebab tersebut didalam perubahan rencana kerja tahun 2022 ini dilakukan berbagai penyesuaian diantaranya:

- Penyesuaian kebutuhan anggaran untuk mencapai target dari program/ kegiatan dan sub kegiatan.
- Penyesuaian anggaran sesuai dengan peraturan kebijakan yang dikeluarkan terkait perizinan.

Urusan Perdagangan

1. Pengelolaan sarana perdagangan (pasar tradisional) belum memenuhi standar
2. Belum terkendalinya harga kebutuhan bapokting pada hari besar keagamaan.
3. Belum adanya pelaku usaha ekspor yang berasal dari Kab. Belitung Timur
4. Rendahnya pelaku usaha perdagangan dalam tertib perizinan.
5. Belum adanya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan.
6. Ketidak patuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban di bidang metrologi.

Untuk menjawab faktor penyebab tersebut didalam perubahan rencana kerja tahun 2022 ini dilakukan berbagai penyesuaian diantaranya:

- Penyesuaian kebutuhan anggaran untuk mencapai target dari program/ kegiatan dan sub kegiatan
- Adanya rencana penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perdagangan Antar Daerah

Bidang Perindustrian

1. Terbatasnya kemampuan produksi IKM dalam memenuhi permintaan pasar
2. Rendahnya daya saing produk olahan IKM.
3. Rendahnya kesadaran IKM untuk memiliki izin usaha.
4. Belum tersedianya informasi data IKM secara terperinci khususnya terkait informai data IKM di SIINAS

Untuk menjawab faktor penyebab tersebut didalam perubahan rencana kerja tahun 2022 ini dilakukan berbagai penyesuaian diantaranya:

- Penyesuaian anggaran yang disebabkan penambahan jumlah anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah yang belum terakomodir pada Rencana Kerja Murni Tahun 2022.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022

Dari Renja Perubahan yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, dengan memperhatikan rencana strategis kementerian terkait dan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur guna diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rencana kerja RKPD Perubahan yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan dan identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD maupun DAK berikut pendanaan indikatif.

Perbedaan antara Rencana Kerja awal dengan hasil analisis kebutuhan sebagian besar disebabkan :

1. Penyesuaian beberapa target indikator sub kegiatan.
2. Perubahan pagu indikatif yang disesuaikan dengan rencana target indikator dan kebutuhan yang akan dicapai pada tahun 2022;
3. Perubahan rencana pelaksanaan pekerjaan pada usulan Rencana Kerja awal rencana kerja perubahan dengan rencana kebutuhan pada rencana kerja perubahan 2022, diantaranya :
    - Penyesuaian anggaran untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari DAK Bidang perdagangan di tahun 2023, namun dikarenakan usulan tersebut tidak diakomodir , maka pada rencana kerja akhir rencana kerja perubahan tahun 2022, anggaran tersebut disesuaikan.
    - Terbatasnya waktu pelaksanaan pengerjaan pada saat perubahan rencana kegiatan

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten BelitungTimur.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**Urusan Penunjang**				**7.329.336.233**	**Urusan Penunjang**				**6.964.918.007**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	70	7.329.336.233	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	70	6.964.918.007	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100	4.746.350	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100	5.280.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSPP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	4	4.746.350	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSPP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	4	5.280.100	Tidak sesuai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100	4.820.540.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100	4.627.581.624	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSPP	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	36	4.820.540.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSPP	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	36	4.627.581.624	Tidak sesuai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang	75	151.769.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang	75	66.761.000	

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			berkinerja baik (Persen)					berkinerja baik (Persen)			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	1	6.050.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	5	43.053.000	Tidak sesuai
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	17	145.719.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	5	23.708.000	Tidak sesuai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	80	987.104.563	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	80	941.923.563	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSPP	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	14	19.120.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSPP	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	14	19.120.000	Sesuai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSPP	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	55	130.179.173	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSPP	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	55	120.652.173	Tidak sesuai
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSPP	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	34	53.673.820	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSPP	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	34	40.777.820	Tidak sesuai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSPP	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	7	52.383.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSPP	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	7	46.689.000	Tidak sesuai

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSPP	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2	72.891.570	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSPP	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	7	72.669.570	Tidak sesuai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSPP	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)	8	6.360.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSPP	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)	2	5.880.000	Tidak sesuai
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSPP	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kali)	8	7.028.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSPP	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kali)	8	7.014.000	Tidak sesuai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	85	645.469.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	87	629.121.000	Tidak sesuai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	50	136.889.520	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	50	153.989.520	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSPP	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya (Unit)	20	136.889.520	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSPP	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya (Unit)	23	153.989.520	Tidak sesuai

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	83	752.297.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	83	719.737.700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSPP	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	3	186.040.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSPP	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	3	186.300.000	Tidak sesuai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSPP	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi (Jenis)	6	207.720.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSPP	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi (Jenis)	6	174.320.000	Tidak sesuai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSPP	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	12	358.537.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSPP	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	12	359.117.700	Tidak sesuai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	50	475.988.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	50	449.644.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)	20	395.388.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)	20	329.566.500	Tidak sesuai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)	2	47.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)	4	86.978.000	Tidak sesuai

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSPP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	46	33.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSPP	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	46	33.100.000	Sesuai
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**1.028.596.200**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**1.009.864.800**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	66,67	41.892.700	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	66,67	41.892.700	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	2	6.799.700	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	2	6.799.700	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Sosialisasi dokumen kebijakan Daerah terkait penanaman modal (Kali)	1	6.799.700	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Sosialisasi dokumen kebijakan Daerah terkait penanaman modal (Kali)	1	6.799.700	Sesuai
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia	100	35.093.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia	100	35.093.000	

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen informasi potensi atau peluang usaha (Dokumen)	1	35.093.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen informasi potensi atau peluang usaha (Dokumen)	1	35.093.000	Sesuai
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi (Investor)	1	239.408.500	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		Investor baru yang berinvestasi (Investor)	1	220.391.500	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)	4	239.408.500	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)	4	220.391.500	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Fasilitasi kerjasama strategis antar usaha besar dan UKM (UKM)	1	130.187.500	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Fasilitasi kerjasama strategis antar usaha besar dan UKM (UKM)	1	130.187.500	Sesuai
			Laporan monitoring kerjasama penanaman modal (Laporan)	12				Laporan monitoring kerjasama penanaman modal (Laporan)	12		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Promosi peluang penanaman modal/investasi (Kali)	2	109.221.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Promosi peluang penanaman modal/investasi (Kali)	1	90.204.000	Tidak sesuai
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	83,5	230.179.500	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	83,5	230.179.500	

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (persen)	8	230.179.500	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (persen)	8	230.179.500	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan)	2	230.179.500	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan)	2	230.179.500	Tidak sesuai
			Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan (Laporan)	12				Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan (Laporan)	12		
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen (Kali)	0	-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen (Kali)	0	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	18	476.975.500	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	18	476.975.500	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (persen)	7	476.975.500	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (persen)	50	476.975.500	

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)	15	127.787.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)	15	127.787.500	Sesuai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda (Kali)	4	236.932.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda (Kali)	4	236.932.000	Sesuai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)	50	112.256.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)	50	112.256.000	Tidak sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	54,55	40.140.000	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	54,55	40.425.600	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (persen)	89	40.140.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (persen)	89	40.425.600	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Laporan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang telah diolah (Laporan)	12	40.140.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Laporan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang telah diolah (Laporan)	12	40.425.600	Tidak sesuai

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	URUSAN PILIHAN					**URUSAN PILIHAN**					
III	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**2.886.519.090**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**2.825.727.190**	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Persen)	26	30.000.000	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Persen)	26	30.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki izin (Persen)	25	30.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki izin (Persen)	25	30.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Sosialisasi dan pendampingan perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan (Kali)	1	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Sosialisasi dan pendampingan perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan (Kali)	1	30.000.000	Sesuai
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Persen)	100	2.387.279.410	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Persen)	100	2.328.905.910	

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Cakupan pembangunan/ pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan (persen)	100	2.387.279.410	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Cakupan pembangunan/ pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan (persen)	100	2.328.905.910	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Pembangunan/ Revitalisasi sarana prasarana perdagangan (Unit)	1	423.363.450	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Pembangunan/ Revitalisasi sarana prasarana perdagangan (Unit)	3	348.363.450	Tidak sesuai
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Laporan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Laporan)	12	1.963.915.960	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Laporan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Laporan)	12	1.980.542.460	Tidak sesuai
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Persen)	3,79	155.740.000	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Persen)	3,79	156.025.600	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat kecukupan stok Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting) (Hari)	60	105.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat kecukupan stok Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting) (Hari)	60	105.285.600	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Pengawasan stok bapokting (barang pokok dan barang penting) yang dilakukan (Kali)	12	105.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Pengawasan stok bapokting (barang pokok dan barang penting) yang dilakukan (Kali)	12	105.285.600	Tidak sesuai

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Penurunan selisin harga eceran bahan pokok strategiis terhadap harga rata-rata nasional (persen)	50	33.740.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Penurunan selisin harga eceran bahan pokok strategiis terhadap harga rata-rata nasional (persen)	50	33.740.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting (Laporan)	12	33.740.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting (Laporan)	12	33.740.000	Sesuai
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rasio penerima pupuk terhadap RDKK (Persen)	0,7	17.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rasio penerima pupuk terhadap RDKK (Persen)	0,7	17.000.000	
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		Jumlah Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan (Kali)	4	5.000.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		Jumlah Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan (Kali)	4	5.000.000	Sesuai
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah pengawasan pengadaan pupuk yang dilakukan (Kali)	2	6.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah pengawasan pengadaan pupuk yang dilakukan (Kali)	2	6.000.000	Sesuai
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah pengawasan penyaluran pupuk yang dilakukan (Kali)	12	6.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah pengawasan penyaluran pupuk yang dilakukan (Kali)	12	6.000.000	Sesuai
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Produk unggulan yang memenuhi	1	20.000.000	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Produk unggulan yang memenuhi	1	20.000.000	

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			standar ekspor (Produk)					standar ekspor (Produk)			
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelaku usaha yang memperolah fasilitasi promosi produk unggulan ekspor (pelaku usaha)	2	20.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelaku usaha yang memperolah fasilitasi promosi produk unggulan ekspor (pelaku usaha)	2	20.000.000	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah pembinaan pelaku/calon pelaku usaha ekspor (Kali)	1	20.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah pembinaan pelaku/calon pelaku usaha ekspor (Kali)	1	20.000.000	Sesuai
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (Persen)	72	293.499.680	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (Persen)	72	290.795.680	
			Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Persen)	70				Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Persen)	70		
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		UTTP Bertanda tera sah (UTTP)	850	293.499.680	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		UTTP Bertanda tera sah (UTTP)	850	290.795.680	
			Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran metrologi legal (pelaku usaha)	5				Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran metrologi legal (pelaku usaha)	5		

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		Jumlah Sidang Tera yang dilaksanakan (Kali)	7	268.499.730	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		Jumlah Sidang Tera yang dilaksanakan (Kali)	7	265.795.730	Tidak sesuai
			Pengadaan Peralatan Kemetrologian (Unit)	62				Pengadaan Peralatan Kemetrologian (Unit)	15		
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pengawasan Metrologi legal yang dilaksanakan (Kali)	7	24.999.950	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pengawasan Metrologi legal yang dilaksanakan (Kali)	7	24.999.950	Sesuai
IV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**5.447.079.070**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**5.520.863.870**	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah (Persen)	5,8	5.363.083.270	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah (Persen)	5,8	5.436.578.270	
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Industri kecill menengah (IKM) yang berkembang/ tumbuh setelah mendapat pelatihan dan pendampingan (persen)	40	5.363.083.270	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Industri kecill menengah (IKM) yang berkembang/ tumbuh setelah mendapat pelatihan dan pendampingan (persen)	40	5.436.578.270	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah sentra IKM yang dibina (Sentra)	5	38.100.200	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah sentra IKM yang dibina (Sentra)	5	38.100.200	Sesuai

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah IKM yang disertifikasi (IKM)	95	137.437.150	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah IKM yang disertifikasi (IKM)	95	137.437.150	Sesuai
			Jumlah SDM IKM yang terlatih (IKM)	40				Jumlah SDM IKM yang terlatih (IKM)	40		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumah Kelompok IKM yang terfasilitasi sarana prasarana industri (Kelompok)	4	20.062.750	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumah Kelompok IKM yang terfasilitasi sarana prasarana industri (Kelompok)	4	20.062.750	Sesuai
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah IKM Kerajinan yang terfasilitasi pembina kerajinan (IKM Kerajinan)	30	5.124.583.370	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah IKM Kerajinan yang terfasilitasi pembina kerajinan (IKM Kerajinan)	30	5.198.078.370	Tidak sesuai
			Pengadaan sarana prasarana pendukung kerajinan daerah (unit)					Pengadaan sarana prasarana pendukung kerajinan daerah (unit)	3		
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan IKM (Laporan)	12	42.899.800	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan IKM (Laporan)	12	42.899.800	Tidak sesuai
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha (Persen)	25	10.349.800	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**		Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha (Persen)	25	10.349.800	

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase izin yang dipantau dan dianalisis terhadap izin yang dikeluarkan (Persen)	10	10.349.800	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase izin yang dipantau dan dianalisis terhadap izin yang dikeluarkan (Persen)	10	10.349.800	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen pelaku usaha industri yang telah berizin usaha (Kali)	4	10.349.800	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen pelaku usaha industri yang telah berizin usaha (Kali)	4	10.349.800	Tidak sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase data informasi Industri di SIINAS (Persen)	58,33	73.646.000	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		Persentase data informasi Industri di SIINAS (Persen)	58,33	73.935.800	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menyampaikan data dan informasi secara lengkap (persen)	90	73.646.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menyampaikan data dan informasi secara lengkap (persen)	90	73.935.800	

No	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Laporan informasi data IKM (Laporan)	12	73.646.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Laporan informasi data IKM (Laporan)	12	73.935.800	Tidak sesuai
	JUMLAH				**16.691.530.593**	**JUMLAH**				**16.321.373.867**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan ditahun 2022 yang berasal dari pemangku kepentingan diantaranya:

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan diantaranya:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

- Dalam sub kegiatan ini terdapat usulan yang berasal dari usulan pemangku kepentingan melalui aplikasi SIPD berupa Pembangunan Pasar di Kecamatan Simpang Renggiang. Usulan ini diakomodir berupa pekerjaan pendahuluan berupa pengerasan lahan di tempat rencana akan dibangun pasar tersebut. Berdasarkan kesepakatan rencana pekerjaan ini akan dilaksanakan apabila lahan tersebut sudah dialihkan menjadi asset Pemerintah Kaupaten Belitung Timur. Dikarenakan keterbatasan anggaran, rencana pelaksanaan pekerjaan ini ditunda, sehingga tidak dimasukkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2022.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik.

- Dalam sub kegiatan ini mengakomodir usulan yang berasal dari Desa Dukong terkait permasalahan berupa masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perizinan dan penanaman modalm untuk itu dibutuhkan sosialisasi perizinan dan penanaman modal serta bantuan untuk UMKM di Desa Dukong. Namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan hanya bias mengakomodir mengenai kebutuhan sosialisasi perizinan dan penanaman modal.

3. Program Perencanaan Dan Pembangunan. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

- Dalam sub kegiatan ini mengakomodir usulan yang berasal dari Desa Burong Mandi dengan permasalahan kurangnya alat pendukung kelompok KUBE seperti oven pengering kerupuk dan mesin pemotong singkong. Usulan ini merupakan urusan perindustrian.

Dikarenakan keterbatasan anggaran, rencana pekerjaan tersebut di rasionalisasi.

4. Program Perencanaan Dan Pembangunan. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
   - Dalam sub kegiatan ini mengakomodir usulan yang berasal dari Desa Buding dengan usulan Terbatasnya kemampuan sumber daya dan sarana prasarana industri khususnya industri kecil dan menengah dan permasalahan berupa pelatihan manajemen UMKM. Namun dikarenakan tupoksi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan adalah khusus Industri Kecil dan Menengah (IKM) sehingga berdasarkan kesepakatan dengan pihak Desa Buding pada saat Musrencang Kecamatan Kelapa Kampit pada tanggal 11 Februari 2021, pelatihan manajemen khusus untuk IKM, bukan UMKM.

Berikut tabel usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 yang dapat diakomodir di tahun 2022.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu**		
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik	Kec. Simpang Pesak	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat; Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan		Usulan berupa sosialisasi perizinan dan penanaman modal
			Sosialisasi perizinan	1 kali	
2	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Angka Pertumbuhan IKM**		
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Cakupan Penumbuhan dan pengembangan IKM		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit	Jumlah SDM IKM yang terlatih	25 IKM	usulan berupa pelatihan manajemen usaha IKM

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSPP

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSPP) Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Berikut Tujuan dan Sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan DPMPTSPP yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yaitu:

Untuk mendukung misi I : **Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik,** berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu intu dan Perdagangan :

Tujuan:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pelayanan publik;
- Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Sasaran :

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
- Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Untuk mendukung misi II : **Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja,** berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu intu dan Perdagangan :

Tujuan:

- Meningkatnya investasi;
- Meningkatkan industri berbasis masyarakat;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
- Meningkatnya daya saing daerah;

Sasaran :

- Meningkatkan investor yang berinvestasi;
- Meningkatkan Produksi Industri Kecil dan Menengah;
- Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan;

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan merupakan jalan untuk terwujudnya visi dan misi dari Kepala Daerah yang sudah menjadi visi dan misi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2022 sebesar Rp 13.258.451.000,- , namun dalam Renja Perubahan tahun 2022 ini ada penambahan pagu dalam program/kegiatan/ sub kegiatan dari usulan awal yang tercantum dalam Renja tahun 2022 menjadi Rp 16.321.373.867,-. Perubahan pagu ini dikarenakan berbagai macam alasan diantaranya :

1. Diterimanya anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melebihi dari usulan yang ada dalam Renja 2022, yaitu berupa DAK Fisik dan Non Fisik bidang IKM dan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal
3. Adanya rasionalisasi beberapa kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga ada beberapa pekerjaan yang pada renja tahun 2022 diusulkan namun pada saat tahapan penyusunan PPAS tidak terakomodir.
4. Adanya penyesuaian anggaran, dengan kebutuhan dan target indikator yang akan dicapai.

Berikut Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif tahun 2022 dan Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Tahun 2022.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

No	Urusan	Renja Murni Tahun 2022				Renja Perubahan Tahun 2022			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Penanaman Modal	5	6	10	815.442.500	5	6	9	1.009.864.800
2	Perdagangan	5	7	14	2.968.000.000	5	7	11	2.825.727.190
3	Perindustrian	3	3	7	1.437.500.000	3	3	7	1.041.130.670
4	Urusan Pendukung	1	7	20	8.037.508.500	1	7	19	6.964.918.007
	JUMLAH				**13.258.451.000**				**16.321.373.867**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	URUSAN PENUNJANG							**8.037.508.500**	**7.729.516.933**	**6.964.918.007**							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persentase		Persentase	70 persentase	70 persentase	**8.037.508.500**	**7.729.516.933**	**6.964.918.007**						**70 Persentase**	**8.965.497.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 persen	100 persen	**7.000.000**	**5.282.350**	**5.280.100**						**100 Persen**	**15.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun				4 dokumen	4 dokumen	7.000.000	5.282.350	5.280.100	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat yang menerima Pelayanan	4 Dokumen	15.000.000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	Persen		Persen	100 persen	100 persen	**5.879.543.000**	**5.879.543.000**	**4.627.581.624**						**100 Persen**	6.467.497.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				46 orang	36 orang	5.879.543.000	5.879.543.000	4.627.581.624	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	36 orang	6.467.497.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	75 persen	75 persen	**96.777.000**	**32.537.000**	**66.761.000**						**75 persen**	**166.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-				-	-	36.777.000	-	-							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				2 orang	5 orang	30.000.000	15.119.000	43.053.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 Orang	45.000.000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek				5 orang	5 orang	30.000.000	17.418.000	23.708.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Orang	45.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	80 persen	80 persen	**750.876.000**	**607.731.563**	**941.923.563**						80 Persen	**792.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				11 jenis	14 jenis	28.985.000	19.120.000	19.120.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai/ASN	14 Jenis	26.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diadakan				55 jenis	55 jenis	130.000.000	119.679.173	120.652.173	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai/ASN	55 jenis	95,000,000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				44 jenis	34 jenis	46.853.000	41.673.820	40.777.820	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai/ASN	34 jenis	44,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia				9 jenis	7 jenis	43.515.000	40.383.000	46.689.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai/ASN	7 jenis	35,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia				8 jenis	7 jenis	90.815.000	72.891.570	72.669.570	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai/ASN	7 jenis	80,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				2 jenis	2 jenis	6.480.000	6.360.000	5.880.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai/ASN	2 jenis	7,500,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu				8 kali	8 kali	4.228.000	4.228.000	7.014.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai/ASN	8 kali	4,500,000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
											keluraha n						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang di laksanakan				42 kali	87 kali	400.000.000	303.396.000	629.121.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai/ASN	87 kali	500,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	50 persen	50 persen	**167.750.000**	**121.137.020**	**153.989.520**						**50 persen**	**300,000,000**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya				28 unit	23 unit	167.750.000	121.137.020	153.989.520	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai/masyarakat yang menerima pelayanan	23 unit	300,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang kantor	Persen		Persen	83 persen	83 persen	**738.565.000**	**727.297.500**	**719.737.700**						**83 persen**	**755.000.000**

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah layanan surat menyurat yang tertangani				4 jenis	3 jenis	189.650.000	186.040.000	186.300.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	3 jenis	225,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah layanan jasa komunikas,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				5 jenis	6 jenis	188.640.000	182.720.000	174.320.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	6 jenis	135,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor				29 orang	12 orang	360.275.000	358.537.500	359.117.700	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	12 orang	395,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	50 persen	50 persen	**396.997.500**	**355.988.500**	**449.644.500**						**50 persen**	**470.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan laik jalan				20 unit	20 unit	281.997.500	275.388.500	329.566.500	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai/masyarakat yang menerima pelayanan	20 unit	315,000,000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
											keluraha n						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik				4 bangunan	4 bangunan	65.000.000	47.500.000	86.978.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai/masyarakat yang menerima pelayanan	4 bangunan	70,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dim pelihara				10 unit	46 unit	50.000.000	33.100.000	33.100.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai/masyarakat yang menerima pelayanan	46 unit	85,000,000
	URUSAN PENANAMAN MODAL							**815.442.500**	**1.040.939.000**	**1.009.864.800**							

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Cakupan Kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**66,67**	**66,67**	**50.000.000**	**41.892.700**	**41.892.700**						**66.67 persen**	**50.000.000**
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan kententuan (kebijakan)**	**Kebijakan**		**Kebijakan**	**2**	**2**	**10.000.000**	**6.799.700**	**6.799.700**						**2 kebijakan**	**0**
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sosialisasi dokumen kebijakan Daerah terkait Penanaman Modal (Kali)				1	1	10.000.000	6.799.700	6.799.700	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Penanam Modal	1 kali	0
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Persentase informasi investasi yang tersedia (persen)**				**100**	**100**	**40.000.000**	**35.093.000**	**35.093.000**						**100 persen**	**50,000,000**

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi potensi atau peluang usaha (Dokumen)				1	1	40.000.000	35.093.000	35.093.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	penanam modal/investor se-kabupaten belitung timur	1 dokumen	50,000,000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Investor baru yang berinvestasi (Investor)**	**Investor**		**Investor**	**1**	**1**	**330.000.000**	**241.503.500**	**220.391.500**						**1 investor**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)**	**Sektor**		**Sektor**	**4**	**4**	**330.000.000**	**241.503.500**	**220.391.500**						**4 sektor**	**630.187.500**
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Fasilitasi kerjasama strategis antar usaha besar dan UKM (UKM)				1	1	150.000.000	130.187.500	130.187.500	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat, penanam modal/investor dan pelaku usaha	1 UKM	130,187,500

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
		Laporan Monitoring kerjasama penanaman modal (Laporan)				12	12									12 laporan	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi peluang penanaman modal/investasi (Kali)				2	1	180.000.000	111.316.000	90.204.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	masyarakat, penanam modal/invest or dan pelaku usaha	1 kali	500,000,00 0
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**83,5**	**83,5**	**274.132.500**	**240.427.300**	**230.179.500**						**83.5 perse n**	**323,996,00 0**
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (persen)**	**Persen**		**Persen**	**8**	**8**	**274.132.500**	**240.427.300**	**230.179.500**						8 persen	**323,996,00 0**
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan)				2	2	256.132.500	230.179.500	230.179.500	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	Masyarakat	12 laporan	303,996,00 0

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
		Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan (Laporan)				12	12									2 laporan	
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen (Kali)				50	0	18.000.000	10.247.800	-							
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)**	**Investor**		**Investor**	**18**	**18**	**101.310.000**	**476.975.500**	**476.975.500**						**18 investor**	**583.431.000**
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (persen)**				**7**	**7**	**101.310.000**	**476.975.500**	**476.975.500**						**50 persen**	**583.431.000**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)				25	15	39.750.000	113.518.000	127.787.500	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	15 kali	140,000,000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
												Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)				4	4	50.560.000	195.323.000	236.932.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	4 kali	218,431,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kali)				150	50	11.000.000	168.134.500	112.256.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	50 kali	225,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**54,55**	**54,55**	**60.000.000**	**40.140.000**	**40.425.600**						**54.55 persen**	**60.000.000**

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**89**	**89**	**60.000.000**	**40.140.000**	**40.425.600**						**89 persen**	**60.000.000**
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang telah diolah (Laporan)				12	12	60.000.000	40.140.000	40.425.600	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat,instansi	12 laporan	60,000,000
								2.968.000.000	**2.473.995.590**	**2.825.727.190**							
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**26**	**26**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**						**26 persen**	**30.000.000**
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki izin (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**25**	**25**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**						**25 persen**	**30.000.000**

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sosialisasi dan pendampingan perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan (Kali)				1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	pelaku usaha	1 kali	30,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**100**	**100**	**1.226.000.000**	**2.150.495.910**	**2.328.905.910**						**100 persen**	**6,950,000,000**
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Cakupan Pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan (persen)**	**Persen**		**Persen**	**100**	**100**	**1.226.000.000**	**2.150.495.910**	**2.328.905.910**						**100 persen**	**6,950,000,000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan/Revitalisasi sarana prasarana perdagangan (Unit)				1	1	421.000.000	348.363.450	348.363.450	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-	Masyarakat	3 unit	6,000,000,000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
											keluraha n			sektor Prioritas			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Laporan)				12	12	805.000.000	1.802.132.460	1.980.542.460	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	Masyarakat	12 laporan	950,000,000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**3,79**	**3,79**	**1.287.000.000**	**80.000.000**	**156.025.600**						**3.79 persen**	**30.000.000**
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Tingkat kecukupan stol Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting) (Hari)**	**Hari**		**Hari**	**60**	**60**	**30.000.000**	**30.000.000**	**105.285.600**						**60 hari**	**30.000.000**
	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengawasan stok Bapokting (barang pokok dan barang penting) yang dilakukan) (Kali)				12	12	30.000.000	30.000.000	105.285.600	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	Masyarakat	12 kali	30,000,000
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Rata-rata Nasional (persen)**	**Persen**		**Persen**	**50**	**50**	**1.240.000.000**	**33.000.000**	**33.740.000**						**50 persen**	**1,140,000,000**
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	Laporan pemantauan harga dan stok barang				12	12	40.000.000	33.000.000	33.740.000	Kab Belitung Timur	Dana Transfer Umum-		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi	Masyarakat	12 laporan	40,000,000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	kebutuhan pokok dan barang penting (Laporan)									Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Alokasi Umum		Melalui Pengembang an Sektor-sektor Prioritas			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasi Pasar Murah Bersubsidi (Kali)				0	0	1.200.000.000	-	-							
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio penerima pupuk terhadap RDKK (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**0,7**	**0,7**	**17.000.000**	**17.000.000**	**17.000.000**						**0.7 persen**	**76.000.000**
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan (Kali)				4	4	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembang an Sektor-sektor Prioritas	Masyarakat	4 kali	60,000,000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk yang dilakukan (Kali)				2	2	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	Masyarakat	2 kali	8,000,000
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk yang dilakukan (Kali)				12	12	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	Masyarakat	12 kali	8,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor (Produk)**	**Persen**		**Persen**	**1**	**1**	**230.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**						**1 produk**	**445,000,000**
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)	**Pelaku Usaha yang memperoleh Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Ekspor (Pelaku Usaha)**	**Pelaku Usaha**		**Pelaku Usaha**	**2**	**2**	**230.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**						**2 pelaku usaha**	**445,000,000**

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Daerah Kabupaten/Kota																
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional (Kali)				0	0	180.000.000	-	-							
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal (Kali)				0	0	30.000.000	-	-							
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pembinaan pelaku/calon pelaku usaha ekspor (Kali)				1	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembang an Sektor-sektor Prioritas	KUB dan IKM se Belitung Timur	1 kali	45,000,000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**72**	**72**	**195.000.000**	**193.499.680**	**290.795.680**						**70 persen**	**992.500.000**
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Persen)	**Persen**		**Persen**	**70**	**70**									**72 persen**	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**UTTP Bertanda tera sah (UTTP)**	**Pelaku Usaha UTTP**		**Pelaku Usaha UTTP**	**850**	**850**	**195.000.000**	**193.499.680**	**290.795.680**						**5 pelaku usaha**	**992.500.000**
		Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran				**5**	**5**									**850 UTTP**	

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
		metrologi legal (pelaku usaha)															
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah sidang Tera yang dilaksanakan (Kali)				7	7	170.000.000	168.499.730	265.795.730	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	masyarakat dan pelaku usaha	7 kali 15 Unit	975,000,000
	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan Metrologi Legal yang dilaksanakan (Kali)				7	7	25.000.000	24.999.950	24.999.950	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	masyarakat dan pelaku usaha	7 kali	17,500,000
	Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah penyidikan yang dilaksanakan (Kali)				0	0	-	-	-							
	URUSAN PERINDUSTRIAN							**1.437.500.000**	**5.447.079.070**	**5.520.863.870**							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**5,8**	**5,8**	**1.317.500.000**	**5.363.083.270**	**5.436.578.270**						**5.80 persen**	**2.528.000.000**
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Persentase Industri kecill menengah (IKM) yang berkembang/ tumbuh setelah mendapat**	**Persen**		**Persen**	**40**	**40**	**1.317.500.000**	**5.363.083.270**	**5.436.578.270**						**40 persen**	**2.528.000.000**

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
		pelatihan dan pendampingan (persen)															
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sentra IKM yang dibina (Sentra)				5	5	50.000.000	38.100.200	38.100.200	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	masyarakat,IKM	5 sentra	52.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang disertifikasi (IKM)				95	95	300.000.000	137.437.150	137.437.150	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	masyarakat,IKM	95 IKM	605.000.000
		Jumlah SDM IKM yang terlatih (IKM)				40	40									40 IKM	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok IKM yang terfasilitasi sarana prasarana industri (Kelompok)				4	4	107.500.000	20.062.750	20.062.750	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	masyarakat,IKM	4 kelompok	1.110.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Kerajinan yang terfasilitasi pembina kerajinan (IKM Kerajinan)				30	30	800.000.000	5.124.583.370	5.198.078.370	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-	masyarakat,IKM	30 IKM kerajinan 3 unit	700.000.000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
											keluraha n			sektor Prioritas			
	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan IKM (Laporan)				12	12	60.000.000	42.899.800	42.899.800	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	masyarakat,IKM	12 laporan	61.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**25**	**25**	**20.000.000**	**10.349.800**	**10.349.800**						**25 persen**	**20.000.000**
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase izin yang dipantau dan dianalisa terhadap izin yang dikeluarkan (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**10**	**10**	**20.000.000**	**10.349.800**	**10.349.800**						**10 persen**	**20.000.000**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen pelaku usaha industri				4	4	20.000.000	10.349.800	10.349.800	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-	IKM,masyarakat dan pelaku usaha	4 kali	20,000,000

NO	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Outcome/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian target RKPD Tahun 2021	TARGET 2022		PAGU			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202	
						PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	PENJABARAN APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	
	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	yang telah berizin usaha (Kali)									keluraha n			sektor Prioritas			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase data informasi Industri di SIINAS (Persen)**	**Persen**		**Persen**	**58,33**	**58,33**	**100.000.000**	**73.646.000**	**73.935.800**						**58.33 persen**	**100.000.000**
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menyampaikan data dan informasi secara lengkap (persen)**				**90**	**90**	**100.000.000**	**73.646.000**	**73.935.800**						**90 persen**	**100.000.000**
	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Laporan Informasi Data IKM (Laporan)				12	12	100.000.000	73.646.000	73.935.800	Kab Belitung Timur Semua Kecamatan, Semua keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas	IKM,masyarakat dan stakeholder	12 laporan	100,000,000
	JUMLAH							13.258.451.000	16.691.530.593	16.321.373.867							21,328,611,500

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur . Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Perubahan DPMPTSPP Tahun 2016-2021 untuk Tahun Anggaran 2021.

Manggar, 2022
Kepala Dinas
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

Drs. Liatim
NIP 19641224 199203 1 007

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perubahan DPMPTSPP Kabupaten Belitung Timur

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerahdan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

Manggar, 2022
Kepala DPMPTSPP
Kabupaten Belitung Timur

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

Drs. LIATIM
NIP 19641224 199203 1 007

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45-[illegible] TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Mei 2022.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 521 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

I. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Pokja I
4.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Pokja II
5.	Kepala Bidang Pembinaan SD	Pokja III
6.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Pokja IV

II. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Wakil Ketua 1
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Wakil Ketua 2
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Anggota
7.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
8.	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
11.	Kepala UPT Puskesmas Manggar	Anggota
12.	Kepala UPT Puskesmas Mengkubang	Anggota
13.	Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Anggota
14.	Kepala UPT Puskesmas Renggiang	Anggota
15.	Kepala UPT Puskesmas Gantung	Anggota
16.	Kepala UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
17.	Kepala UPT Puskesmas Dendang	Anggota
18.	Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
20.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
21.	Pengelola Perencana	Anggota
22.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota

III. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Anggota
7.	Kepala UPT SPAM	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
10.	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
11.	Fungsional Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
12.	Fungsional Penata Ruang	Anggota
13.	Fungsional Tehnik Jalan dan Jembatan	Anggota
14.	Fungsional Tehnik Pengairan	Anggota

IV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan Perumahan	Anggota
6.	Kasie Perencanaan dan Pengendalian Perumahan	Anggota
7.	Kasie Penyediaan dan Pengembangan Perumahan	Anggota
8.	Kasie Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

V. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan	Ketua
3.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sekretaris I
4.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Sekretaris II
5.	Kasi Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
7.	Kasi Perlindungan Masyarakat	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dam Kepegawaian	Anggota
9.	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan	Anggota
10.	Kasi Operasional Pengendalian dan Ketertiban Umum	Anggota

VI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota

VII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10.	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
11.	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial	Anggota
12.	Sub Koordinator Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam	Anggota
13.	Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
14.	Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin	Anggota
15.	Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Anggota
16.	Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Anggota
17.	Sub Koordinator Penataan Desa	Anggota
18.	Sub Koordinator Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota
19.	Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	Anggota
20.	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan	Anggota
21.	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender	Anggota
22.	Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota
23.	Sub Koordinator Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender	Anggota

VIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
4.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek	Anggota
6.	Kassubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

IX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
5.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
7.	Kepala Bidang Penyuluh Pertanian	Anggota
8.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

X. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan	Anggota
4.	Kepala Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	Anggota
7.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
7.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
10	Analis Kebijakan pada bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
11	Analis Kebijakan pada bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Administrator Database	Anggota
13	Analis Kebijakan pada bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
14	Pranata Komputer	Anggota
15	Arsiparis	Anggota

XII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Anggota
4.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayaran	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
7.	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	Anggota
8.	Kepala Seksi Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	Anggota
10	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Barang	Anggota
11	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan	Anggota
12	Analis kebijakan	Anggota

XIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penyelenggaraan e- Government	Anggota
4	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
8	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
9	Fungsional Statistisi Ahli Muda	Anggota
10	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota

XIV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Anggota
4	Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
6	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
7	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota

XV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kabid Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	Anggota
4.	Kabid Pemberdayaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Anggota
5.	Kabid Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sapras	Anggota
6.	Analis Kebijakan Koordinator Seksi Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan Prestasi	Anggota
7.	Analis Kebijakan Koordinator Seksi Pembibitan dan Pemanduan Bakat Olahraga	Anggota
8.	Analis Kebijakan Koordinator Seksi Olahraga Rekreasi, Kemasyarakatan dan Layanan Khusus	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Koordinator Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Analis Kebijakan Koordinator Kasie Sapras dan Industri Olahraga	Anggota
12.	Analis Kebijakan Koordinator Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Anggota
13.	Pengadministrasi Perencana dan Program	Anggota
14.	Staf Pengadministrasi Perencana dan Program	Anggota

XVI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
4.	Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemasaran Wisata dan Kelembagaan Kepariwisataan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
7.	Kepala Seksi Warisan dan Tradisi/Pamong Budaya Ahli Muda	Anggota
8.	Kepala Seksi Kelembagaan Kepariwisataan/Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan/Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
10.	Kepala Seksi Industri Pariwisata/Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan/Perencana Ahli Muda	Anggota
12.	Kepala Seksi Kesenian/Pamong Budaya Ahli Muda	Anggota
13.	Kepala Seksi Pemasaran Wisata/Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Anggota
14.	Kepala Seksi Destinasi Wisata/Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Anggota
15.	Pamong Budaya Pertama	Anggota

XVII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota
4.	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
5.	Sub Koordinator Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Anggota
6.	Sub Koordinator Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Anggota
7.	Sub Koordinator Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Anggota
8.	Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XVIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

No	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Anggota
6	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Anggota
7	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Anggota
8	Analis Akuakultur	Anggota
9	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota

No	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
10	Analis Pasar Hasil Perikanan	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12	Analis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota
13	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota
14	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	Anggota
15	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
16	Analis Pendaftaran Kapal Perikanan	Anggota
17	Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Anggota

XIX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

XX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Persidangan, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Panganggaran	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Pengawasan	Anggota

XXI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
6.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Fungsional Analis Kebijakan Pertama	Anggota
10.	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
11.	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Anggota
12.	Fungsional Peneliti Ahli Muda	Anggota

XXII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak BPKPD Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah BPKPD Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak BPKPD Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPD Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah BPKPD Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda	Anggota
11.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota

XXIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan	Ketua
3.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur	Anggota
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur	Anggota
6.	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Anggota
7.	Kepala Subbidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian	Anggota
9.	Subkoordinator Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara	Anggota
10.	Subkoordinator Mutasi dan Kepangkatan	Anggota
11.	Subkoordinator Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur	Anggota
12.	Subkoordinator Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional	Anggota
13.	Subkoordinator Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Anggota
14.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXIV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua
3.	Kepala Subbagian Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Sekretaris
4.	Kepala Subbagian Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kepala Subbagian Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
6.	Analis Wawasan kebangsaan	Anggota
7.	Pengelola Data	Anggota

XXV. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
5.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Anggota
7.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Kepala Sub Koordinator Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi	Anggota

XXVI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
6.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan	Anggota
7.	Kepala Seksi Kesejahateraan dan Sosial	Anggota
8.	Kepala Subbagian Umum Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota

XXVII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Gantung	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	Kepala Seksi Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
9	Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian	Anggota

XXVIII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Kelapa Kampit	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
6.	Kepala Seksi Pembangungan dan Pemberdayaan	Anggota
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Sosial	Anggota
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Anggota

XXIX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Kasi Pelayanan	Anggota

XXX. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN DAMAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Damar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
4.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
5.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXXI. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretaris
4.	Bendahara	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Anggota
11.	Arsiparis	Anggota
12.	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
13.	Pengadministrasi Pelayanan	Anggota

XXXII. TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Dendang	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5.	Kasubbag Perencanaan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesejahateraan Sosial	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
8.	Kasubbag Umum Kepegawaian	Anggota
9.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
10	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN